

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menjelang akhir abad ke-20, isu demokrasi menjadi faktor penting dalam perkembangan politik global. Terutama di negara-negara berkembang, demokrasi melibatkan hampir seluruh bagian masyarakat. Awalnya merupakan pandangan filosofi, demokrasi kemudian berkembang menjadi sistem politik dan kini dianggap sebagai metode terbaik untuk menciptakan negara yang aman dan sejahtera. Di Indonesia, demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling baik (Aspinall dan Edward, 2019). Selain itu, dalam persaingan calon presiden dan wakil presiden untuk periode 2019-2024, terdapat perdebatan mengenai sistem ekonomi kerakyatan versus ekonomi liberal atau neoliberal, yang berkaitan dengan masalah demokrasi ekonomi (Mietzner dan Marcus, 2020).

Sebenarnya, dasar konsep demokrasi di Indonesia adalah Pancasila, yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada sila keempat. Kata kunci dari sila keempat adalah ‘kerakyatan,’ yang berarti kedaulatan rakyat, setara dengan istilah ‘demokrasi.’ Demokrasi ini mencakup tiga aspek utama: politik, sosial-budaya, dan ekonomi. Namun, biasanya pembicaraan tentang demokrasi lebih banyak berfokus pada aspek politik dibandingkan dengan aspek ekonomi dan sosial-budaya.

Pada masa Orde Lama, Soekarno menyebut sistem demokrasi yang diterapkannya sebagai ‘Demokrasi Terpimpin.’ Ia berpendapat bahwa sistem ini sejalan dengan Pancasila. Namun, pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno mendapat kritik tajam dari berbagai pihak karena dianggap menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan, Bung Hatta juga memberikan kritik keras terhadap model demokrasi terpimpin tersebut.

Dengan dimulainya Orde Baru, istilah ‘Demokrasi Pancasila’ menggantikan dan memperbaiki Demokrasi Terpimpin sebagai konsep khas

demokrasi Indonesia. Demokrasi Pancasila, yang menjadi ciri khas rezim Orde Baru, juga menghadapi banyak kritik dan perdebatan, terutama dalam konteks makna hakiki dari sila keempat Pancasila. Di sisi lain, terdapat perdebatan mengenai makna istilah ‘demokrasi’ dan ‘kedaulatan rakyat’ atau ‘kerakyatan,’ dengan sebagian orang menganggap keduanya identik, sementara yang lain melihat perbedaan antara keduanya.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, di mana pemerintahan dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), di mana Indonesia telah mengadakan pemilu secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden. Indonesia, yang memakai sistem demokrasi dalam pemilihan elektoralnya memiliki corak untuk memilih pemimpinnya dengan bahasa “Pemilihan Umum” atau yang disingkat “Pemilu”. Pemilu, dianggap menjadi ruang/metode yang paling baik untuk menentukan pemimpin yang baru karena dianggap paling egaliter (semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih). Walaupun, Negara Indonesia juga pernah beberapa kali mengganti bentuk sistem demokrasinya.

Perjalanan pemilihan umum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan dari masa kolonial hingga era modern. Berikut adalah ringkasan mengenai sejarah pemilu di Indonesia: Pemilu Kolonial (1905-1942), pemilihan umum di Indonesia dimulai selama masa penjajahan Belanda, dengan pemilu pertama diadakan pada tahun 1905 untuk memilih perwakilan pribumi di Volksraad (Dewan Rakyat), sebuah badan legislatif yang dikuasai oleh Belanda. Namun, Volksraad memiliki kekuasaan yang terbatas dan peran pribumi dalam pemilihan sangat minim. Periode Kemerdekaan (1945-1959), setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini adalah Pemilu Konstituante, yang bertujuan memilih anggota badan legislatif untuk menyusun konstitusi negara. Berbagai partai politik, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI),

dan Partai Masyumi, berpartisipasi dalam pemilu ini. Demokrasi Terpimpin (1959-1965), pada periode ini, pemilu berlangsung dalam suasana politik yang tidak demokratis karena penerapan sistem Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Soekarno. Partai-partai politik dibatasi dan digantikan oleh satu partai tunggal, Partai Nasional Indonesia (PNI), yang memegang kekuasaan. Orde Baru (1966-1998), setelah peristiwa G30S/PKI dan jatuhnya Soekarno, Soeharto memimpin sebagai presiden pada era Orde Baru. Pemilu diatur berdasarkan UU No. 5 Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1985, yang menetapkan sistem Dwifungsi ABRI, dimana Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) terlibat dalam politik dan sosial kemasyarakatan. Partai Golkar, sebagai partai penguasa, mendominasi pemilu pada periode ini. Reformasi (1998-sekarang), pada tahun 1998, reformasi politik menggulingkan rezim Soeharto, membuka jalan bagi perubahan sistem politik dan proses pemilu. Sejak tahun 1999, pemilu legislatif dan presiden diadakan kembali dengan sistem yang lebih bebas dan pluralis, melibatkan partai-partai politik yang lebih beragam. Dengan adanya uraian tersebut terhitung pemilihan umum di Indonesia sudah terjadi sebanyak 12 kali dan pemilu dianggap sebagai hal yang krusial dalam sistem demokrasi modern.

Dalam prosesnya, politik selalu berdampingan dengan sendi-sendi sosial yang ada baik secara sosial, sejarah, maupun ekonomi. Secara sosial-budaya politik, tentunya berasal dari sebuah sistem nilai dan keyakinan yang ada di suatu masyarakat itu sendiri. Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan beragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus mampu mencapai tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu. Sehingga dapat diklasifikasikan tipe-tipe orientasi bahwa budaya politik mengandung tiga komponen yaitu orientasi kognitif (pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajiban serta input dan outputnya. orientasi afektif, berupa perasaan terhadap sistem

politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya. Orientasi evaluatif, berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar penilaian kriteria informasi dan perasaan. Atau dengan secara garis besar, budaya politik juga bisa diartikan dalam bentuk budaya politik yang parokial (tingkat partisipasi yang rendah yang disebabkan faktor kognitif), budaya politik kaula yang relatif sudah maju dalam sosio-ekonominya tetapi masih pasif. Dan budaya politik partisipan yang ditandai dengan kesadaran politik yang tinggi (Anggara, Sahya. 2013).

Sehingga, di dalamnya tentu mengalami banyak sekali dinamika proses dalam menuntaskan aktifitas politik yang dijalani, khususnya peran “ekonomi/uang”. Menurut Aspinall & Sukmajati dalam buku mereka Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme Pada Pemilu Legislatif 2014, politik uang umumnya didefinisikan sebagai upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau layanan untuk mempengaruhi pilihan suara mereka. Definisi yang lebih praktis diberikan oleh Jeffrey A. Winters, seorang ilmuwan politik Amerika, yang menyatakan bahwa politik uang adalah tindakan politik untuk memobilisasi pemilih agar memilih partai politik atau calon tertentu di tempat pemungutan suara dengan imbalan uang, barang, atau jasa selama pemilu.

Dari dua definisi yang dikemukakan oleh ilmuwan politik di atas dapat disimpulkan bahwa politik uang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyuap atau membeli suara pemilih demi kepentingan politik bagi dirinya sendiri maupun kelompoknya. Terbilang dalam masyarakat yang berbeda juga dalam setiap wilayah, antropologi sosiologi masyarakat juga tentunya mempengaruhi corak budaya politik setiap daerahnya. Disana akan menjadi representatif integratif akan adanya perkembangan sejarah kebudayaan, ilmu pengetahuan, keyakinan, corak sistem pemerintahan atas sosio-kultur suatu wilayah yang ada. Terkhusus, dalam masyarakat di daerah Cibiru, Kota Bandung. Masyarakat yang begitu urban dengan dikelilingi banyak tempat

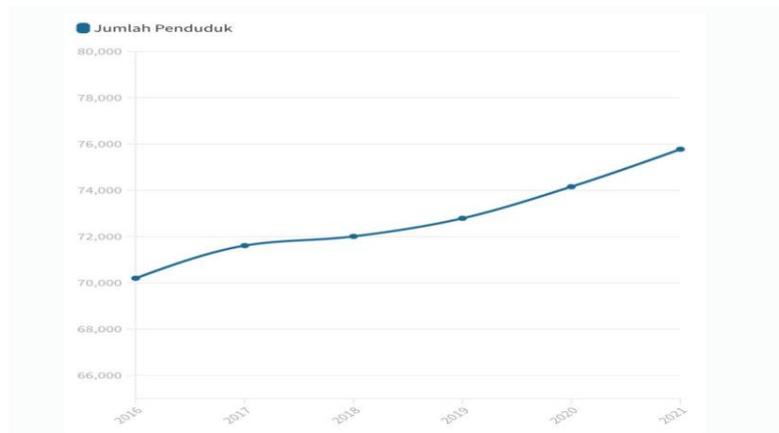
pendidikan, mampu menjadi *invisible hand* dalam hal pembentukan watak berfikir dan bertindak akan pemahamannya bagaimana politik itu bekerja.

Kota Bandung dikenal dengan berbagai daya tarik yang ada di dalamnya. Konsep kota kreatif saat ini tersemat pada Bandung, yang sering disebut Paris Van Java (Kunto, 1985). Selain kreativitas yang menjadi daya tarik utama kota ini, ada banyak aspek lain yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Kepadatan ibu kota provinsi Jawa Barat ini menarik banyak pendatang. Urbanisasi sudah terlihat sejak awal perkembangan Bandung, ketika kota ini menjadi pusat pertemuan dan hiburan, menjadikannya kota kosmopolitan (Kunto, 1985; Supiarza, 2019). Sebagai kota kosmopolitan, Bandung mencerminkan karakteristik masyarakat urban, yang sering disebut sebagai komunitas urban. Kehidupan masyarakat kota berbeda dari pedesaan (Muhammad, 2017). Meski ekonomi menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat urban, tingkat konsumerisme yang tinggi mencerminkan sifat mereka, di mana belanja lebih didorong oleh gengsi daripada kebutuhan.

Faktor ekonomi merupakan salah satu persoalan bagi masyarakat urban, namun dibalik persoalan itu sifat konsumerisnya sangat tinggi. Sifat konsumeris merupakan ciri masyarakat urban, yakni belanja bukan karena kebutuhan, namun karena gengsi (Zahra, Mustaqim, & Hendra, 2020).

Masyarakat urban di Kota Bandung, khususnya golongan bawah, tinggal di area dengan kepadatan penduduk tinggi. Fenomena kepadatan ini terlihat di berbagai daerah di Kota Bandung, dan salah satu kawasan yang diamati oleh peneliti adalah Cibiru (Warsana, Nafsika, and Undiana 2021). Dilansir dari [kcic.co.id](http://kcic.co.id) dan [aljabbar.jabarprov.go.id](http://aljabbar.jabarprov.go.id) Wilayah yang strategis dengan Proyek Strategis Provinsi yaitu Masjid Al-Jabbar dan Proyek Strategis Nasional yaitu Kereta Cepat Jakarta-Bandung tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional sehingga itu memperkuat modal sosial perkembangan daerah Cibiru sebagai daerah urban dalam perkotaan.

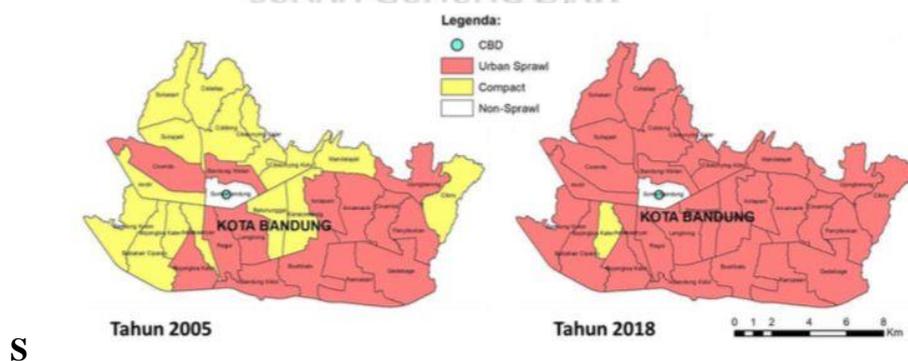
### **Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Cibiru**



**Sumber : [data.bandung.go.id/matadata](https://data.bandung.go.id/matadata)**

Cibiru merupakan kecamatan paling timur Kota Bandung. Berdasarkan data dari portal Data Kota Bandung, Cibiru memiliki luas wilayah 684 hektare area, yang terbagi dalam empat kelurahan yaitu Kelurahan Pasir Biru, Palasari, Cisurupan dan Cipadung. Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kecamatan Cibiru sebanyak 70.201 orang dan pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kecamatan Cibiru meningkat menjadi 75.777 orang. Tercatat penambahan sebanyak 5.576 orang dalam kurun waktu 6 tahun. Sedangkan, untuk kepadatan penduduk di Kecamatan Cibiru pada tahun 2021 sebanyak 111 jiwa/ha.

**Gambar 1. 2 Perkembangan Urban Sprawl dari Tahun 2005 - 2018**



**Sumber: Widiawaty, Dede, dan Ismail (2019)**

Berdasarkan gambar 1.2 diatas kecamatan Cibiru yang sebelumnya tidak termasuk daerah urban dengan seiring berjalannya waktu kecamatan tersebut menjadi daerah urban, disebabkan karena persebaran penduduk

yang begitu cepat dan diikuti dengan pertumbuhan situs ekonomi yang menjadi modal sosial sebuah wilayah untuk berkembang menjadi daerah yang meningkat statusnya. Cibiru menjadi daerah urban berbeda dengan daerah lain dikarenakan secara geografis, berada di daerah perbatasan antara wilayah di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Sehingga ciri khas daerah urban nya berbeda dengan daerah lain.

Menurut hasil penghitungan yang dilakukan dalam rapat pleno KPU Kota Bandung di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang pada Minggu (5/5/2019), PKS memperoleh 295.615 suara. PKS mengungguli PDIP yang mendapatkan 226.588 suara dan Gerindra yang meraih 204.717 suara. Andri Ruswana, Ketua Bidang Kepemudaan DPC PKS Kota Bandung dan saksi parpol dalam rapat pleno, menyatakan bahwa data tersebut sesuai dengan yang dimiliki tim internal. Dengan hasil tersebut, PKS merasa yakin dapat meraih 13 kursi di DPRD Kota Bandung. Terhitung, karena Kecamatan Cibiru termasuk Dapil 4, terdapat 9 anggota dewan yang terpilih disana. Sehingga kemudian, diharapkan mampu merepresentatifkan dapilnya untuk menjadi penyuar aspirasi dalam ruang legislatif di Kota Bandung.

Dalam hal budaya politik atau perilaku pemilih di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, tentunya banyak dipengaruhi oleh budaya masing-masing sehingga dapat membentuk sebuah pola kebebasan bergaya baik secara pemikiran maupun praktiknya nanti. Karena di daerah Kecamatan Cibiru dekat dengan kampus, tentunya banyak pula penggerak pada saat itu yang berasal dari mahasiswa/pemuda, tokoh masyarakat yang berkenaan pula menjadi tenaga pendidik, dan para tokoh agama yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, bukan berarti tidak adanya praktek *money* politik tidak ada disana. Pada umumnya juga, *money* politik terjadi di berbagai daerah. Dibuktikan dengan banyaknya penelitian tentang praktek *money* politik dan persepsi di masyarakat bahwa politik itu harus dengan “uang”. Dibuktikan dengan adanya temuan dugaan politik uang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April

2019, warga mengikuti senam yang rutin dilakukan, dan setelah selesai kegiatan senam, seorang ibu mengajak warga untuk mampir ke rumahnya dan di sana terjadi pembagian bubuk deterjen merk boom yang di tempeli contoh surat suara yg menunjukkan cara memilih calon (Sumber: dari keterangan Rilis Dugaan Politik Uang oleh BAWASLU 2019).

Membicarakan persoalan tentang pertentangan antara urusan sosial dan poliitik di dalam masyarakat, Jhon Locke mengemukakan itu semua dalam teori kontrak sosial dan masyarakat sipilnya (Nur Wahyudi 2022). Sehingga, Jhon Locke menganggap bahwa persoalan itu harus kembali kepada hakikatnya masing-masing yang dalam artiannya peneliti mencoba ingin menjelaskan dalam konteks kontestasi pemilu yang demokratis tentunya ada pemisahan antara urusan sosial yang harus tetap mengedepankan rasionalitas politiknya sebagai respon sosial dalam politik dan mengupayakan *check in balancing* yang baik antara pemerintah dengan rakyat sebagai wujud bentuk sirlukasi demokrasi yang baik. Sehingga, kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam konteks pemilu yang demokratis secara substantif, yang dalam hal ini tantangan terkini demokrasi Indonesia, antara lain: (a) budaya politik uang, (b) polarisasi politik, (c) ekstremisme dan radikalisme, (d) ketergantungan SDA, dan (e) perubahan iklim. Peradaban demokrasi di Indonesia dibangun diatas landasan pola pikir, pola sikap dan pola perilaku yang integratif dari masyarakat yang memiliki heterogenitas tinggi baik dari suku, agama, ras maupun antar golongan. Sedangkan peradaban demokrasi di barat dibangun berlandaskan pada pijakan rasionalitas, intelektualitas dan homogenitas(Muhdi and Surabaya 2024).

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana dampak *money politics* terhadap perilaku pemilih dalam masyarakat urban di Cibiru, Kota Bandung karena berkaitan dengan pemilu anggota legislatif di daerah. Untuk itu peneliti mengambil judul "***Dampak Money Politics Terhadap Perilaku Pemilih Di Masyarakat Urban***".

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan, bahwa teridentifikasi masalah seperti berikut:

- a. *Money Politik* yang berfokus hanya kepada politik uang bukan politik gagasan.
- b. Pendidikan politik yang minim berdampak terhadap partisipasi masyarakat yang pasif, disebabkan masyarakat sudah cukup tidak percaya terhadap pelaksanaan politik yang monoton (negatif).
- c. Terjadinya *black campaign* dan ketimpangan sosial karena politik hanya dianggap untuk orang yang memiliki uang banyak saja.

## 1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan di ruang lingkup politik Kecamatan Cibiru Kota Bandung karena di Kota Bandung sedang mengalami keadaan masyarakat yang terbelah beragam mulai dari masyarakat yang terlibat aktif dalam relawan politik, dan ada pula yang berpartisipasi politik pasif saja, dan bahkan acuh terhadap politik di wilayah ini. Sehingga, dapat dirumuskan permasalahan yang ada tersebut dengan diantaranya;

- a. Bagaimana budaya politik yang ideal dalam masyarakat urban di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
- b. Bagaimana budaya kampanye dan keadaan sosial politik yang ideal dalam masyarakat urban di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
- c. Apakah dampak *money* politik terhadap perilaku pemilih di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Penulis sudah seharusnya memiliki tujuan yang jelas agar bisa meningkatkan wawasan keilmuan pada objek yang diteliti, hal tersebut serupa dengan pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui budaya politik yang ideal dalam masyarakat urban di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

- b. Untuk mengetahui budaya kampanye dan keadaan sosial politik yang ideal dalam masyarakat urban di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui dampak *money* politik terhadap perilaku pemilih di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

### 1.5 Kegunaan Penelitian

Ada beberapa harapan untuk melakukan penelitian ini, salah satu dari harapannya adalah dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis bagi pemangku kepentingan.

#### a. Kegunaan Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini besar harapan mampu menyumbangkan pengetahuan serta kontribusi pemikiran baru khususnya di ranah Ilmu Politik. Hasil riset ini semoga bisa menjadi dokumen akademik yang bermanfaat bagi sivitas akademika serta menjadi pedoman untuk peneliti lainnya.

#### b. Kegunaan Praktis

##### 1. Untuk Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu peneliti mempraktekkan ilmu yang diperolehnya dalam pelatihan, meningkatkan kemampuan intelektual dan memperluas wawasan.

##### 2. Untuk Lembaga

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan agar instansi terkait, dapat konsisten menjaganya dalam segala bentuk strategi dan bentuk kerjasama yang telah dibangun antara pemerintah/lembaga, pihak swasta dan masyarakat dengan tujuan untuk menambah kesadaran masyarakat dalam pentingnya memahami Budaya Politik Masyarakat Urban yang ideal di ranah politik Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

##### 3. Untuk Masyarakat

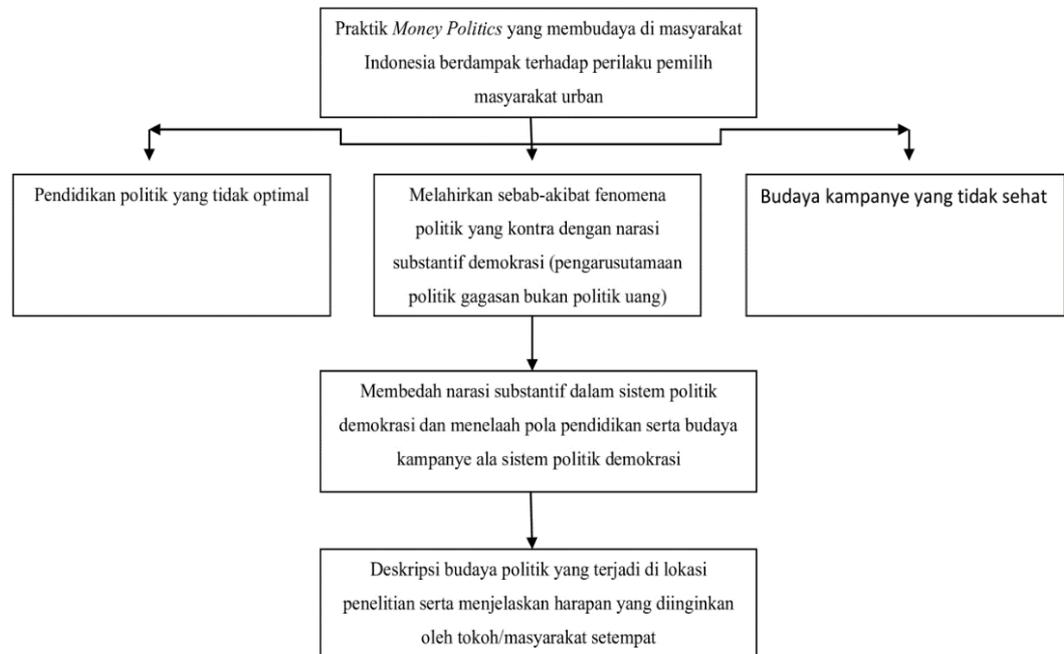
Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan pemahaman untuk masyarakat dalam pentingnya memahami Budaya Politik Masyarakat Urbandi ranah politik khususnya di Kota Bandung.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Berangkat dari identifikasi masalah yang ditemukan di lokasi penelitian, *money politics* menjadi sebuah permasalahan dalam konteks perilaku pemilih dalam budaya politik demokrasi substansial. Bahwa politik uang terlalu menghegemoni budaya politik yang ada sehingga politik gagasan dikesampingkan. Hal tersebut terjadi karena pendidikan politik yang minim sehingga masyarakat yang notabene sudah tidak percaya terhadap politik (dianggap negatif) berdampak pula terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam politik. Ketimpangan sosial-pun lahir ketika dalam kontestasi politik hanya bisa dilakukan bagi orang yang memiliki uang saja karena selalu memakai uang dalam melakukan sebuah kegiatan kampanye atau konsolidasi politik yang ingin dilakukan.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah Teori Sistem David Easton. Menurut David Easton, sistem politik adalah sistem interaksi dalam setiap masyarakat didalamnya dibuat alokasi yang mengikat atau bersifat otoritatif diimplementasikan. Easton memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem yang terdiri dari aktivitas yang saling berkaitan. Aktivitas itu menemukan hubungan-hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa aktivitas itu mempengaruhi bagaimana keputusan otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan. Bila kehidupan politik dipandang sebagai suatu sistem aktivitas, maka dijumpai suatu konsekuensi tertentu dari cara melakukan analisis mengenai operasi suatu sistem (Magriasti 2011).

*Kebijakan-kebijakan itu, selalu mempunyai konsekuensi kepada sistem politik itu sendirimaupun kepada objek dari kebijakan itu sendiri yakni lingkungan masyarakat. Sebuah proses peng-inputan yang berasal dari diluar instrumen sistem politik merupakan sebuah komponen sistem itu sendiri sehingga sebuah sistem itu mampu bekerja dengan baik. Proses peng-inputan itu mampu dikonversi menjadi sebuah perjalanan proses sistem politik itu sendiri hingga melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan yang memiliki otoritas penuh.*



Dengan memakai teori tersebut, nanti akan dipakai sebagai pisau analisis atas realita yang terjadi di lapangan. Dengan proses penelitian dan pengembangan informasi yang akan dilakukan tentunya akan melahirkan premis/tesis baru yang bisa kita jadikan bahan dialektika atas teori, realita, dan pengolahan informasi yang di dapat. Sehingga bisa kita temukan inti permasalahan apa yang terjadi dan solusi apa yang akan diberikan atas permasalahan tersebut.

Setelah kita mendialektikakan hasil dari pembahasan atas teori dan realita di lapangan, kita juga akan mampu mengetahui sebetulnya perilaku/budaya politik seperti apa yang tercermin dari masyarakat di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Sehingga temuan tersebut pula mampu dikomparasikan dengan tinjauan ilmiah atas budaya politik yang ideal di sistem politik yang memakai konsep demokrasi.

### Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

## 1.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian sebelumnya memiliki tujuan agar mendapat bahan perbandingan dan pedoman atas permasalahan yang diteliti dengan penelitian yang sebelumnya. Juga agar terhindar dari pendapat adanya kemiripan dengan penelitian ini. Sehingga di tinjauan pustaka penulis akan menyebutkan hasil penelitian terdahulu, yaitu:

- a. **Rafly Hendika, 2021** yang berjudul “Pengaruh *Money Politic* Terhadap Pilihan politik Masyarakat Pada Pemilihan legislatif Di Kota Jambi Tahun 2019 (studi Kasus: Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi). Dalam Skripsi ini Peneliti terdahulu memfokuskan lokusnya di Kota Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan respon masyarakat terhadap *money politic* di Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Teknik penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa masyarakat yang berada di lingkungan Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi masih minim pengetahuan tentang *money politic*, yang menyebabkan banyak warga yang memilih atas dasar pengaruh dari pihak calon yang telah memengaruhi warga melalui *money politics* (Hendika 2022).
- b. **Agilia Gunawan, 2020** yang berjudul “Praktek *Money Politics* Dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 (Studi Kasus Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang)”. Tujuan Penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah di atas makatujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menjelaskan bentuk-bentuk *Money Politics* yang dilakukan di Pamulang Barat, menjelaskan faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya *Money Politics* di Masyarakat Pamulang Barat, dan menjelaskan respon masyarakat terhadap *Money Politics* di Pamulang Barat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sumber data primer dari wawancara langsung dengan beberapa calon legislatif, tim sukses, Panitia Pengawas Pemilu, dan masyarakat. Selain itu data

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal, undang-undang, dan dokumen penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Sumber data ini dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen yang dianalisis dengan metode analisis diskriptif (Gunawan 2020).

- c. **Salsabila Athaya Fauzi, Agus Machfud Fauzi**, 2021 yang berjudul “Fenomena *Money* Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018” Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan masyarakat mengambil uang yang berasal dari calon kepala desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode kualitatif. Penelitian ini tidak menggunakan angka, dimana nantinya akan berbentuk deskriptif (Sugiyono, 2017). Penelitian menggunakan kualitatif dikarenakan dapat mendeskripsikan fakta nyata yang berada di lapangan dan dapat menjelaskan lebih dalam (Anggito, 2018). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling* (Etikan, 2016). Jika sesuai dengan pengalaman maka data akan lebih akurat dan berkaitan dengan fokus penelitian. Subjek penelitian ialah Dinamika warga Desa Petiken yang memilih kepala desa karena uang yang mereka terima. Pengumpulan akan menggunakan teknik wawancara agar mendapatkan informasi secara mendalam dari subjek penelitian. Subjek penelitian dipilih karena penelitian akan mendapat data yang akurat. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan informasi yang bisa didapatkan dari media. Penelitian ini dikaji menggunakan kacamata fenomenologi milik Alfred Schutz (Fauzi and Fauzi 2021).
- d. **Eka Mei Riska Br Sitepu, Julia Ivanna**, 2024 yang berjudul “Dampak *Money* Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Di Desa Lau Cimba, Kabupaten Karo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari politik uang terhadap partisipasi masyarakat di Desa Lau Cimba, Kabupaten Karo. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kualitatif yang dimana menggunakan serangkaian kegiatan seperti mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat, pengumpulan data pustaka dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ataupun artikel. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin di bahas. Wawancara mendalam dilakukan bersama masyarakat setempat didesa Lau Cimba, wawancara ini bertujuan untuk mencari tau lebih dalam apa penyebab dari politik uang yang semakin meningkat (Sitepu and Ivanna 2024).

- e. **Mohammad Mahlufi Kudamba, Aminah, S.IP., M.IP, Ardiansyah, S.IP.,MA**, 2023 yang berjudul “Analisis Dampak Politik Uang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan terjadinya PolitikUang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Banda Aceh.Penelitian ini berlokasi di Banda Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 7 (Tujuh) orang yang berasal Komisi Independen Pemilihan (KIP) kota Banda Aceh , Panwaslih Kota Banda Aceh dan masyarakat kota Banda Aceh. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Kudamba et al. 2023).